

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2017

Rina Purwati, Sumaryanto, S.E., M.Si., Akt., C.A.

Universitas Ahmad Dahlan, Dosen Universitas Ahmad Dahlan

Email : rina1500012017@webmail.uad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local taxes, regional levies and balancing funds on the financial performance of districts / cities in Java in 2017. The financial ratio used is the ratio of regional independence. The sample in this study were 101 districts / cities with a purposive sampling method.

The results showed that regional taxes and balance funds influence the financial performance. Meanwhile, local user fees do not affect financial performance.

Keywords: local taxes, regional levies, balance funds, and financial performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2017. Rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio kemandirian daerah. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 101 kabupaten/kota dengan metoda *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan dana perimbangan perbengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci : pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan kinerja keuangan

PENDAHULUAN

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002 : 299).

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Suatu daerah merupakan daerah otonomi apabila memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangannya sendiri yang bertujuan untuk meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Kemampuan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan dalam mengatur keuangan rumah tangganya sendiri. Keuangan daerah dapat dikelola menggunakan manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah yaitu pengelolaan sumber-sumber daya

atau kekayaan yang dimiliki suatu daerah untuk mencapai tujuan suatu daerah. Sehubungan dengan efektifnya otonomi daerah maka kinerja pemerintah daerah dalam keuangan daerah sangat dituntut untuk membiayai aktivitas daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber PAD yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Transfer antar pemerintah merupakan fenomena yang terjadi di semua negara yang terlepas dari sistem pemerintahannya (Kuncoro 2007). Pemberian dana transfer ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (disparitas vertikal), dan kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah.

Dalam perkembangannya, kinerja keuangan pemerintah justru tidak mengalami perkembangan yang berarti, bahkan cenderung mengalami penurunan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan antara lain Florida (2007) menyimpulkan bahwa secara parsial hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang dominan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan laba BUMD dan Penerimaan Lain-lain yang sah tidak dominan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan terdapat pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian lain yang dilakukan oleh Julitawati (2012) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan Dana Perimbangan juga berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Serta Rukmana (2013) menyimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Riau, secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Riau, dan secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Riau, serta secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Pulau Jawa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya alam yang berlimpah, dengan pusat objek wisata yang beraneka ragam, dan pulau paling maju diantara pulau lainnya dalam hal sarana prasana yang berkaitan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonominya, dan kaya akan sumber daya alamnya terutama

kehutanan menjadikan Pulau Jawa sebagai pemasok ekspor ke luar negeri dan dalam negeri dalam memasok bahan bangunan dan pabrik kertas yang berasal dari bahan baku kayu sehingga dengan berbagai keuntungan yang dimiliki menjadikan pulau Jawa memiliki potensi untuk mandiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Berdasarkan keseluruhan belanja langsung dan tidak langsung pemerintah daerah kabupaten dan kota, Pulau Jawa memiliki anggaran untuk belanja langsung paling besar dibandingkan pulau lainnya. Hal ini menandakan belanja modal yang merupakan bagian belanja langsung di pulau tersebut berdasarkan kabupaten dan kota menjadi prioritas kepala daerah masing-masing, sehingga menunjukkan kecenderungan dana yang dimiliki daerah akan selalu digunakan untuk belanja modal

KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalian sumber-sumber kekayaan asli daerah atau PAD harus terus dipacu pertumbuhannya (Wenny, 2012). Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penting PAD ini akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian Florida (2007) mengatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karakteristik pajak daerah yang terdiri dari banyak jenis seperti

Pajak Hotel, Hiburan, dan lain-lain menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber kekuatan utama daerah dalam menggali pendapatan asli daerahnya. Sehingga dapat dijelaskan semakin tinggi pajak daerah, maka kinerja keuangan daerah tersebut semakin baik.

H1 = Pajak Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Siahaan (2005) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber PAD ini juga menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di daerah tersebut. Dari hasil penelitian Florida (2007) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sama seperti pajak daerah yang memiliki banyak karakteristik, retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendanaan PAD sebuah kota/kabupaten, meskipun tidak sedominan pajak daerah. Semakin tinggi persentase retribusi daerah suatu daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah suatu daerah.

H2 = Retribusi Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun (Julitawati, 2012). Dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK ini jelas menunjukkan kinerja fiscal suatu daerah. Khususnya bagi DAU dan DAK, jika persentase suatu daerah dalam penerimaan ke dua dana tersebut tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa celah fiscal / kapasitas fiscal daerah tersebut rendah, yang juga menunjukkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Artinya jika DAU dan DAK suatu daerah tinggi, maka kinerja keuangan daerah tersebut kurang baik. Sebaliknya jika DBH suatu daerah tinggi, maka kinerja keuangan daerah tersebut baik.

H3 = Dana Perimbangan berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Objek penelitian adalah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

Uji Kolmogorof-Smirnov adalah apabila nilai $\text{sig } n > 0.05$ atau 5% maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan apabila nilai $\text{sig } n < 0.05$ atau 5% maka data tersebut berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	101
Kolmogorov-Smirnov Z	1,083
Asymp. Sig. (2-tailed)	,191

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji Kolmogorof-Smirnov menunjukkan bahwa data keseluruhan variabel memiliki nilai sig sebesar 0,191 yang berarti bahwa nilai $\text{sig} > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dilihat dari tolerance atau variance inflation factor (VIF). Apabila nilai tolerance $> 10\%$ atau 0.01 dan nilai VIF < 10 maka data tersebut bebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.3

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
(Constant)	20,929	1,340		15,619	,000		
1 PD	27,279	2,333	,888	11,691	,000	,332	3,016
RD	1,160	1,429	,063	,811	,419	,317	3,154
DP	-,332	,047	-,332	-7,130	,000	,882	1,134

a. Dependent Variable: KD

Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber : Olah Data SPSS 20 (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa untuk variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan memiliki nilai tolerance > 10% dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan keseluruhan variabel tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Tabel 4.4

Hasil Uji Heterokedastisitas Rank Spearman

		PD	RD	DP	KD
Spearman's rho	PD				
	Correlation Coefficient	1,000	,616**	,366**	,736**
	Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,000
	N	101	101	101	101
RD	Correlation Coefficient	,616**	1,000	,397**	,368**
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,000
	N	101	101	101	101

DP	Correlation Coefficient	,366**	,397**	1,000	,107
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,286
	N	101	101	101	101
KD	Correlation Coefficient	,736**	,368**	,107	1,000
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,286	.
	N	101	101	101	101

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Olah Data SPSS 20 (2019)

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil uji heterokedastisitas menggunakan *Rank Spearman* atau *Spearman Rho* menunjukkan bahwa nilai signifikan Pajak Daerah sebesar 0,736, Retribusi Daerah sebesar 0,368, Dana Perimbangan sebesar 0,107, dan semua variabel independen > 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menghubungkan antara variabel independen atau lebih (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015 : 157).

Berikut ini adalah hasil persamaan regresinya :

TABEL 4.5

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
(Constant)	20,929	1,340		15,619	,000		
1 PD	27,279	2,333	,888	11,691	,000	,332	3,016
RD	1,160	1,429	,063	,811	,419	,317	3,154
DP	,332	,047	,332	7,130	,000	,882	1,134

a. Dependent Variable: KD

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut :

$$Y = 20,929 + 27,279 X_1 + 1,160 X_2 - 0,332 X_3 + e$$

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menjawab pernyataan hipotesis secara parsial. Uji t digunakan untuk melihat masing-masing pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikansi dalam penelitian.

Berikut ini adalah hasil uji hipotesis parsial :

Tabel 4.6

Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig. Two-tailed	Sig. One-tailed
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	20,929	1,340		15,619	,000	,000
PD	27,279	2,333	,888	11,691	,000	,000
RD	1,160	1,429	,063	,811	,419	,2095
DP	,332	,047	,332	7,130	,000	,000

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis parsial (uji t) adalah sebagai berikut :

1) Pajak Daerah (X₁) terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Terlihat pada kolom *Coefficients* terdapat nilai sig 0,000. Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,000 < 0,05 maka hipotesis terdukung. Variabel X₁ mempunyai thitung sebesar 11,691. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X₁ mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat

disimpulkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan.

2) Retribusi Daerah (X_2) terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Terlihat pada kolom *Coefficients* terdapat nilai sig 0,2095. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,2095 > 0,05$ maka hipotesis tidak terdukung. Variabel X_2 mempunyai t_{hitung} sebesar 0,811. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

3) Dana Perimbangan (X_3) terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Terlihat pada kolom *Coefficients* terdapat nilai sig $0,000 < 0,05$. Variabel X_3 mempunyai t_{hitung} sebesar 7,130. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan.

Uji Koefisien Regresi (Uji F)

Uji F digunakan untuk menjawab pernyataan hipotesis secara simultan. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen yang digunakan dalam regresi linier berganda terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7069,502	3	2356,501	142,105	,000 ^b
	Residual	1608,535	97	16,583		
	Total	8678,037	100			

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 142,105 dengan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga hipotesis dapat diterima. Artinya secara bersama-sama variabel pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya nilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 4.8

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,903 ^a	,815	,809	4,07220

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,809. Nilai tersebut berarti bahwa 80% perubahan tingkat pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Semakin tinggi pajak daerah, maka kinerja keuangan daerah tersebut semakin baik.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
3. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun.

5.1. KETERBATASAN

Keterbatasan dari penelitian ini adalah periode data yang digunakan dalam penelitian ini hanya tahun 2017, penggunaan rasio untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini hanya menggunakan satu rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang diajukan dalam yaitu agar lebih memperhatikan tingkat pendapatan pajak, retribusi dan dana perimbangan. Pajak daerah dan retribusi daerah harus dioptimalkan guna meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi ketergantungan penerimaan dari dana perimbangan. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kebutuhan daerahnya menggambarkan pemerintah daerah telah berkinerja dengan baik. Peneliti selanjutnya dapat menambah periode penelitian dan menambah variabel rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga dapat menambah sampel yang digunakan atau objek penelitian. Sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Maisyuri. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 3(1), 41–56.
- Ani, N. L. N. P., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(3), 481–497.
- Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK*, 6(1 Juli 2015), 1–18.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Erlina, 2008. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Kedua, USU Press, Medan.
- Florida, Asha. 2007. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 7. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 7. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul Dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Julitawati, Ebit. Darwanis. Jalaludin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Tesis. Universitas Syiah Kuala.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.

Lupiyoadi, Rambat dan Ikhsan, Ridho Bramulya. 2015. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset

_____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset

Nordiawan, Deddi Dan Ayuningtyas, Hertianti. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 : Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rukmana, Wan Vidi. 2013. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Siahaan, Marihot P. 2015. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabeta.

Tanjung Pinang. Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

www.bps.go.id

www.djpk.depkeu.go.id